

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

*Signaling Theory* menjelaskan bahwa individu atau pihak-pihak internal perusahaan umumnya memiliki akses informasi yang lebih lengkap mengenai keadaan perusahaan serta prospeknya di masa depan dibandingkan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah.<sup>36</sup> Sinyal yang dimaksud merujuk pada penyampaian informasi secara terbuka kepada publik mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Teori sinyal berperan dalam mengurangi asimetri informasi di pasar, sehingga semua pihak memiliki akses terhadap informasi yang setara.<sup>37</sup>

Menurut Hergianti dan Retnani dalam penelitian oleh Jihan Apriliya Dkk menjelaskan bahwa teori sinyal mengacu pada upaya manajer dalam mengomunikasikan ekspektasi kepada investor melalui elemen-elemen dalam laporan keuangan, dengan harapan sinyal tersebut mencerminkan prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan.<sup>38</sup> Teori ini juga membahas pentingnya penyampaian informasi oleh agen kepada principal, baik terkait pencapaian maupun kegagalan manajemen, serta langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

---

<sup>36</sup> Desi Puspita Sari, —Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan,|| *ResearchGate*, no. November (2022): 1–26.

<sup>37</sup> Michael, S, —Job Market Signaling|| 87, no. 3 (2020): 355–74.

<sup>38</sup> Jihan Aprilya et al., —Pengaruh Likuiditas, Leverage, Risiko Pasar Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022),|| 2024, 27.

Teori sinyal menjelaskan pentingnya perusahaan dalam menyampaikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut mencerminkan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh manajemen untuk mewujudkan tujuan pemilik perusahaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hergianti dan Retnani, sinyal positif muncul ketika perusahaan melakukan investasi yang pada akhirnya mendorong peningkatan harga saham serta nilai perusahaan, sehingga menciptakan persepsi positif di mata publik. Teori ini menekankan bahwa perusahaan dengan kinerja yang baik akan memberikan sinyal yang positif kepada pasar. Sinyal yang efektif adalah sinyal yang dapat dipercaya dan diterima oleh pasar, yang pada gilirannya mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya.<sup>39</sup>

Kinerja perusahaan yang baik dapat berfungsi sebagai sinyal positif, sementara kinerja yang buruk memberikan sinyal negatif, sebagaimana dijelaskan dalam teori sinyal dan konsep kinerja keuangan. Investor, yang memiliki orientasi pada keuntungan, cenderung menghindari perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak sehat. Dalam konteks ini, teori sinyal memiliki kaitan erat dengan kinerja keuangan, di mana semakin luas pengungkapan informasi oleh perusahaan akan mengirimkan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun pemegang saham (*shareholder*). Semakin banyak informasi yang diungkapkan kepada pihak-pihak tersebut, maka semakin besar pula pemahaman mereka terhadap kondisi perusahaan. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka, yang

---

<sup>39</sup> Alfina Nurlina Hergianti and Endang Retnani Retnani, —Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan,|| *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 1–20.

pada akhirnya tercermin dari penerimaan produk perusahaan di pasar, dan berujung pada peningkatan profit.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi yang transparan dan akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan memiliki peran penting dalam membangun persepsi pasar. Dalam hal ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kunci dalam memperkuat mekanisme penyampaian sinyal kepada investor dan stakeholder. *Corporate Governance* (GCG) menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, yang secara langsung mendukung penyampaian sinyal positif melalui pengungkapan informasi yang lebih terbuka dan dapat dipercaya. Semakin kuat implementasi *Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan memperoleh kepercayaan dari investor karena dianggap memiliki integritas dalam menyajikan informasi. Dengan demikian, sinyal yang ditangkap pasar akan lebih berkualitas, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat loyalitas investor, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

## **B. Good Corporate Governace**

### **a. Pengertian Good Corporate Governace**

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan system pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan

(*Hard Definition*), Maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*Soft Definition*)<sup>40</sup>

Menurut Pedoman Umum *Corporate Governance* tahun 2006, Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi berbasis pasar, yang memiliki kaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan yang menerapkannya, serta mencerminkan kualitas iklim usaha di suatu negara.

<sup>41</sup> Penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 dipahami sebagai mekanisme dan susunan sistem yang dijalankan oleh organ perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan serta memastikan pertanggungjawaban yang memadai. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi sebagai serangkaian aturan dan praktik yang menjadi landasan bagi organ perusahaan dan manajemen dalam menjalankan proses pengelolaan perusahaan. Dokumen pedoman tersebut memuat prinsip-prinsip tata kelola yang selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai yang dianut perusahaan. Dalam penerapannya, *Good Corporate Governance*

---

<sup>40</sup> Sugeng Suroso, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, Hlm 13, 2022.

<sup>41</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, hlm. 1.

(GCG) juga didukung oleh kebijakan internal dan peraturan teknis lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.<sup>42</sup>

*Good Corporate Governance (GCG)* merupakan seperangkat aturan, ketentuan, dan prinsip yang harus dipatuhi perusahaan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien, sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun masyarakat luas, dan juga menyangkut struktur perusahaan, pembagian tugas, pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab diantara elemen-elemen yang membentuk struktur perusahaan, serta mekanisme yang harus dilakukan oleh setiap elemen perusahaan, dan hubungan antara elemen-elemen yang membentuk struktur perusahaan, mulai dari RUPS, direksi, dan anggota komite. Selain itu juga mengatur hubungan antara elemen-elemen yang membentuk struktur perusahaan dengan elemen-elemen di luar perusahaan yang merupakan pemangku kepentingan utama perusahaan, yaitu negara yang berkepentingan untuk mendapatkan pajak dari perusahaan yang bersangkutan, dan masyarakat luas, termasuk para investor public perusahaan jika perusahaan tersebut adalah perusahaan publik, calon investor, kreditur dan calon kreditur.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang disusun untuk

---

<sup>42</sup> PT PP Properti Tbk, *Pedoman Good Corporate Governance*, 2023.

<sup>43</sup> Ibid, hlm 15.

mendorong peningkatan kinerja organisasi, menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika yang berlaku secara luas.<sup>44</sup>

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, Pihak-pihak tersebut mencakup pihak internal seperti dewan komisaris, direktur, dan karyawan, serta pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>45</sup>

### C. Prinsip – prinsip good corporate governance

Prinsip-prinsip utama pada *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban, memiliki peran dalam mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Prinsip-prinsip ini juga mencakup pengakuan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.<sup>46</sup>

#### 1. Transparansi

Transparansi menjadi elemen krusial dalam tata kelola perusahaan, di mana setiap entitas bisnis dituntut untuk menyampaikan informasi yang bersifat material dan relevan secara terbuka, jelas, mudah diakses, serta dapat dipahami oleh publik maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>45</sup> Asnita, M. (2020). Pengaruh Kualitas Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2014-2018 (Doctoral Dissertation, *Universitas Muhammadiyah Palopo*). Hlm 13-14.

<sup>46</sup> Fizi, A., & Helmina, M. R. A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perusahaan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 379-387.

## 2. Kewajaran

Kewajaran adalah ketika perilaku tidak membedakan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Ini memastikan prinsip keadilan dapat terwujud, Perusahaan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

## 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sikap yang bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam perusahaan.

## 4. Rspnsibilitas

Responsibilitas adalah sikap yang mencerminkan bentuk pertanggung jawaban perusahaan atas kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Hal lain bahwa perusahaan akan bertanggung jawab atas dampak yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar agar *Good Corporate Governance* (GCG) dapat tercapai dengan baik.

## 5. Indepedensi

Independensi merupakan prinsip yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk dijalankan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Hijri Alfian And Diyah Sekar Arum, —Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah,|| *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)* 15, No. 2 (2023): 78-79.

#### D. Mekanisme good corporate governance

Penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya untuk mengendalikan perusahaan melalui berbagai kegiatan, seperti pengawasan, tanggung jawab, dan prosedur pengambilan keputusan.

Menurut Aldo Tobing, jika penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup principal dan agen, di mana principal memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen, sedangkan agen menerima bonus dengan nilai yang lebih besar.<sup>48</sup>

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang sering menjadi fokus dalam manajemen laba. Mekanisme tersebut meliputi dewan komisaris, dewan direksi, serta komite audit.

##### 1. Dewan Direksi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi pendiriannya. Direksi juga berperan sebagai perwakilan hukum perusahaan, baik dalam ranah internal maupun eksternal, sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komposisi direksi minimal terdiri dari tiga anggota, dan persyaratan untuk

---

<sup>48</sup> Aldo Tobing, *Pengaruh Kinerja Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020*, 2022.



menjadi anggota direksi harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perlu memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.<sup>49</sup>

Adapun tugas dan tanggung jawab dewan direksi yaitu :

1. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, serta anggaran dasar perusahaan, dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan bank.
2. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh kegiatan perbankan.
3. Menindaklanjuti hasil audit yang disarankan oleh Bank Indonesia, audit internal/eksternal, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang saham.
5. Mengungkapkan kebijakan strategis terkait sumber daya manusia (SDM).
6. Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada komisi komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
7. Setiap anggota dewan direksi wajib menjelaskan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing-masing.
8. Setiap anggota dewan harus mengklarifikasi tanggung jawab dalam bidangnya.

---

9. Keputusan yang diambil oleh direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota direksi.<sup>50</sup>

## 2. Dewan Komisaris

Menurut Harviadi & Arylin dalam penelitian oleh Aldo Tobing, dewan komisaris memiliki peran untuk mengawasi serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh direksi dan memberikan saran jika dianggap perlu. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, pemegang saham, atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan tidak mewakili pemegang saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen, pemegang saham, atau anggota dewan komisaris lainnya.<sup>51</sup>

Berikut tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :<sup>52</sup>

### 1. Melakukan Pengawasan

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan pengelolaan serta pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan usaha PT yang dijalankan oleh Direksi, Hukum Perseroan Terbatas, pengawasan

---

<sup>50</sup> Asnita, M. (2020) Hlm 16.

<sup>51</sup> Tobing, *Pengaruh Kinerja Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020*.

<sup>52</sup> Retno Sariwati, —Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas, *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, No. 1 (2022): 88-95.

ini juga dapat mencakup objek tertentu sesuai dengan kondisi PT, yang antara lain meliputi:

- a) Audit keuangan;
- b) Pengawasan terhadap struktur organisasi PT; dan
- c) Pengawasan terhadap sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pengawasan yang telah dilaksanakan selama satu tahun buku, yang kemudian akan dimuat dalam laporan tahunan PT.

## 2. Memberikan Nasihat kepada Direksi

Selain melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Karena UU Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara rinci, ruang lingkup tugas Dewan Komisaris dalam hal ini menjadi sangat luas. Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat atau pertimbangan yang tepat dan relevan kepada Direksi, bahkan memberikan arahan, petunjuk, peringatan, atau teguran yang konstruktif. Namun, seluruh bentuk nasihat tersebut bersifat rekomendasi dan tidak mengikat Direksi.<sup>53</sup>

Perlu dicatat bahwa kedua tugas ini harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semata-mata untuk kepentingan PT dan sesuai dengan tujuan serta maksud PT.

---

<sup>53</sup> Linda R. Fitriani, Rachmadi Usman, And Achmad Faishal, —Tugas Komisaris Pada Bumd Perseroan Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja,| *Jimps: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 3 (2023): 47–66.

### 3. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang dikutip oleh Tambunan, komite audit merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan beroperasi secara independen serta profesional. Komite ini bertugas mendukung peran pengawasan Dewan Komisaris, khususnya dalam meninjau proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Anggota komite audit harus memenuhi sejumlah kualifikasi, antara lain memiliki integritas tinggi, pemahaman yang memadai mengenai bisnis perusahaan, laporan keuangan, proses audit, serta regulasi yang berlaku.<sup>54</sup> Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau pihak eksternal perusahaan, dengan ketentuan setidaknya satu anggota Komisaris/Dewan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pratiwi Nila Sari And Cahyadi Husadha, —Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16, No. 1 (2020): 46-56.

<sup>55</sup> Hutabarat, R. J. H., & Tobing, S. F. (2022). Peran Audit Internal Dan Komite Audit Dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Tridianti (Jurnal Ratri)*, 3(2), Hlm 22.

1. Memiliki integritas yang baik serta pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang pengawasan atau pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau benturan kepentingan terhadap perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, jika diperlukan.<sup>56</sup>

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam suatu perusahaan diatur dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Meskipun tugas dan tanggung jawabnya dapat bervariasi, setidaknya menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012, Komite Audit memiliki beberapa tugas utama, yaitu:<sup>57</sup>

1. Membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.
2. Mengevaluasi pelaksanaan aktivitas serta hasil audit yang dilakukan oleh unit pengawasan internal maupun auditor eksternal
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian manajemen dan penerapannya.

---

<sup>56</sup> Rusmida Hutabarat And Shelly Farida Tobing, —Peran Audit Internal Dan Komite Audit Dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang,|| *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)* 3, No. 2 (2022): 14-29.

<sup>57</sup> Hutabarat, R. J. H., & Tobing, S. F. (2022). Hlm 23-24.

4. Menjamin tersedianya mekanisme evaluasi yang memadai terhadap seluruh informasi yang dipublikasikan perusahaan.
5. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, di samping pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangan mereka.

Selaras dengan hal tersebut, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN menyatakan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### 4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling pada penelitian Ni Putu Diah Trisna Yanti, ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ni Putu Diah Trisna Yanti, —Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 5, No. 9 (2023): 52–66.

## 5. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen dengan pengawasan yang lebih optimal terhadap berbagai keputusan penting dalam perusahaan. Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.<sup>59</sup>

## E. Kinerja Keuangan

Menurut Merryaini et al pada riset oleh Helin Titania and Salma Taqwa, Kinerja keuangan perusahaan merefleksikan kondisi finansial suatu entitas bisnis yang dinilai melalui analisis laporan keuangan. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh terkait sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif selama periode tertentu, serta menjadi indikator untuk menilai stabilitas dan efisiensi operasional perusahaan.<sup>60</sup> Sementara itu, menurut Sulaiman et al, kinerja mengacu pada pencapaian yang diperoleh pekerja sesuai dengan kegiatan, kebijakan, atau program yang mendukung visi organisasi. Kinerja keuangan menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas penggunaan aset dalam operasional perusahaan guna meningkatkan profitabilitas. Kinerja keuangan dapat

<sup>59</sup> Ibid hlm 67-68.

<sup>60</sup> Helin Titania and Salma Taqwa, —Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,|| *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 3 (2023): 1224–38.

mencapai tingkat optimal apabila perusahaan dikelola dengan baik.<sup>61</sup> Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik berperan krusial dalam memaksimalkan kinerja keuangan melalui transparansi laporan keuangan serta pelaporan tahunan perusahaan.<sup>62</sup>

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari kondisi finansial suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan berbagai alat analisis keuangan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengevaluasi apakah kondisi keuangannya dalam keadaan baik atau buruk, yang sekaligus mencerminkan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan berperan penting dalam membantu pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, laporan tersebut juga bermanfaat untuk menilai kondisi keuangan saat ini serta digunakan sebagai alat prediksi dalam menentukan prospek keuangan di masa mendatang.<sup>63</sup>

Evaluasi kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai pengukuran performa, yaitu suatu proses yang menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya selama periode akuntansi tertentu. Pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas operasional guna memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar dan meningkatkan kemampuannya dalam bersaing secara efektif di dalam industri. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, tersedia berbagai pendekatan analitis yang dapat diterapkan. Penelitian ini secara khusus

---

<sup>61</sup> Ibid hlm 39.

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Helin Titania And Salma Taqwa, —Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, No. 3 (2023): 24-38.



menggunakan analisis rasio keuangan, dengan fokus pada *Return on Equity* (ROE) Sebagai indikator utama dalam menilai tingkat profitabilitas perusahaan.

## **F. Indikator Kinerja Keuangan Perusahaan**

Rasio profitabilitas mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dan menjadi indikator penting bagi pemilik saham untuk menilai kelayakan investasi mereka.<sup>64</sup> Rasio ini mencakup beberapa ukuran utama

### **1. Profit Margin Ratio**

Mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan pengelolaan operasi yang baik. Terdiri dari :

#### **a. Net Profit Margin**

Mengukur laba bersih dari penjualan, mencerminkan efisiensi menyeluruh di seluruh bagian perusahaan (produksi, SDM, pemasaran, dan keuangan).

#### **b. Operating Profit Margin**

Mengukur laba sebelum bunga dan pajak, fokus pada efisiensi operasional tanpa mempertimbangkan beban keuangan.

---

<sup>64</sup> Diyah Putri Kusumaningrum And Ulfah Setia Iswara, —Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),*Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)* 1, No. 3 (2022): 295–312.

### c. Gross Profit Margin

Mengukur laba kotor dari penjualan, menunjukkan efisiensi produksi.<sup>65</sup>

### 2. Return on Equity (ROE)

Menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk menilai efektivitas penggunaan modal oleh manajemen. Semakin tinggi *Return on Equity* (ROE), semakin efisien manajemen dalam mengelola modal.

Rumus:  $ROE = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Ekuitas}) \times 100\%$

### 3. Return on Assets (ROA)

Mengukur efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak. *Return on Assets* (ROA) tinggi menunjukkan bahwa aset digunakan secara optimal. *Return on Assets* (ROA) juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan.

Rumus:  $ROA = (\text{Laba bersih} / \text{Total Aset}) \times 100\%$ <sup>66</sup>

## G. Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Islam

Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan tingkat profitabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset serta ekuitas. Dalam perspektif Islam, kinerja keuangan tidak hanya diukur dari laba yang diperoleh, tetapi juga dari

<sup>65</sup> Dwi Fitrianingsih And Siti Asfaro, —Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia,|| *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, No. 1 (2022): 21–30.

<sup>66</sup> Elloni Shenurti, Desyi Erawati, And Sutanti Nur Kholifah, —Analisis Return On Asset (Roa) , Return On Equity (Roe) Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur,|| *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 19, No. 01 (2022): 01–10.

bagaimana perusahaan tersebut menjalankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam distribusi kekayaannya.

Seperti yang di siratkan dalam QS. Al-Hasyr (59:7) Yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَثَرِ الْقَهْرِ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَى الْقَرْهَبِ وَالْيَهُتْ هُمُ وَالْمَسْكِينُ ۖ وَابْتَغِ الْوَسِيلَةَ ۚ لِيَكُونَ دُورُهُ ۚ ب.ي. ۚ الْعِزَّةَ مِنْكُمُ ۖ وَمَا أَهْتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Yang artinya :

Segala bentuk harta yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu wilayah tanpa melalui peperangan, diperuntukkan untuk kepentingan Allah, Rasul-Nya, kerabat dekat Rasul, anak yatim, kaum miskin, serta musafir. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul hendaknya diterima dan dijalankan, sementara apa yang dilarangnya harus dihindari. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya sanksi dari-Nya sangatlah berat.<sup>67</sup>

Dari arti ayat tersebut, menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam konteks penelitian Dalam konteks penelitian, *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham, Namun, dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan tersebut

<sup>67</sup> —Qs. Al-Hasyr (59:7), I N.D.

di peroleh dengan cara yang halal dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, investor kecil, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

هَيْهَاتَ الَّذِينَ هَامُنُوا لَآ أَمْوَالَكُمْ بَأْيُنكُمْ يَلْبِطِلُ إِلَّآ تَكُونَنَّ تَارَةً عَنْ نَارِ الضَّالِّينَ وَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَهْلَ كَانِ بِكُمْ رَحِيمًا

Dalam al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29 , yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>68</sup>

Ayat tersebut secara jelas menggarisbawahi bahwa Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks kinerja dan pengelolaan perusahaan, yang dilakukan dengan cara-cara bathil atau tidak benar, yaitu cara yang merugikan pihak lain, tidak transparan, atau tidak adil. Dalam Konteks Penelitian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang sehat, transparan, serta akuntabel demi menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders* ).

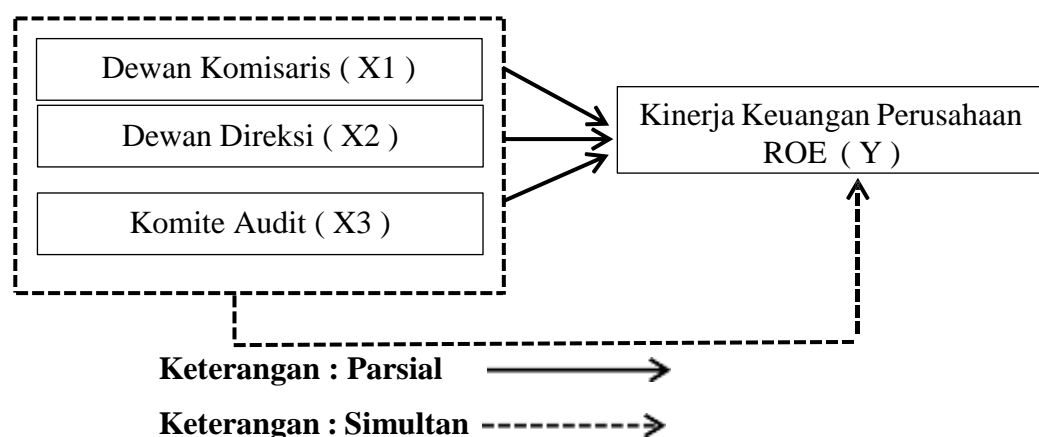
Tafsiran dalam konteks penelitian, ayat ini memberikan arahan bahwa kinerja keuangan yang baik tidak hanya dilihat dari laba atau profit semata,

<sup>68</sup> Irfan Harmoko, —Strategi Pemasaran Produk Bank Syariah Dalam Persaingan Bisnis Perbankan Nasional,|| *Wadiah* 1, no. 1 (2017): Hlm 30.

tetapi juga dari bagaimana proses pencapaian laba tersebut dilakukan, apakah dengan cara yang halal, jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan independensi yang menjadi inti dari penerapan *Good Corporate Governance* selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya dalam mencegah praktik-praktik ekonomi yang bathil seperti manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, atau pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* yang kuat dalam perusahaan bukan hanya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dari sisi *Return On Equity* (ROE) atau indikator keuangan lainnya, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama.

## H. KERANGKA PEMIKIRAN

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR KERANGKA PIKIRAN**



## I. HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut Sugiyono, Hipotesis adalah jawaban sementara yang mempunyai sifat tidak pasti pada rumusan masalah dan harus dites kebenarannya secara empiris<sup>69</sup>

### 1. Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan indikator Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya praktik pengawasan yang objektif dan profesional terhadap aktivitas manajerial perusahaan. Sebagai pihak yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan pemegang saham mayoritas maupun manajemen, dewan komisaris memberikan sinyal kepada publik bahwa perusahaan berkomitmen terhadap tata kelola yang baik dan transparan. Berdasarkan teori sinyal, Dewan komisaris menjadi indikator positif yang dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam mengurangi asimetri informasi serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Penelitian sebelumnya oleh Wulan Suryandani juga menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Darwin, Dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung, 2021), Hlm 81.

<sup>70</sup> Wulan Suryandani, —Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan

Dengan demikian, Hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:.

**H1: Good Corporate Governance dengan indikator Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.**

2. Pengaruh Good Corporate Governance indikator Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan secara independen, dengan tetap mempertimbangkan tujuan perusahaan serta kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penelitian sebelumnya Sari & Setyaningsi Wardati et al. menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin banyak anggota yang kompeten, semakin efektif pengawasan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja perusahaan.<sup>71</sup> Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis ke dua sebagai berikut:

**H2: Good Corporate Governance indikator Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.**

---

Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020),*Journal Of Global Business And Management Review* 4, No. 1 (2022): Hlm 109.

<sup>71</sup> Aristya Dwi Adiyanti, —Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018 - 2022),*2023*. Hlm 67.

### 3. Pengaruh Good Corporate Governance dengan indikator Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit membantu dewan komisaris dalam pengawasan internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan penerapan tata kelola perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Devania Rizky Linuih Dkk, menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.<sup>72</sup> Komite audit yang aktif mengawasi laporan keuangan dan audit eksternal dapat menekan praktik manajemen laba, sehingga meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

#### **H3: Good Corporate Governance dengan indikator Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan**

### 4. Pengaruh Dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan

Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sebagaimana dibuktikan oleh Sari & Setyaningsih dan Wardati et al. Semakin banyak jumlah direksi yang kompeten sesuai bidangnya, maka kinerja perusahaan cenderung meningkat. Hal serupa juga berlaku pada dewan komisaris independen, Menurut Wulan Suryandani, di mana proporsi yang lebih besar meningkatkan efektivitas pengawasan dan berdampak positif terhadap kinerja). Sedangkan menurut Devania Rizky

---

<sup>72</sup> Devania Rizky Linuih And Mutiara Tresna Parasetya, —Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021),*l Diponegoro Journal Of Accounting* 13, No. 1 (2024): 1-15.



Linuih Dkk, Komite audit turut berpengaruh signifikan karena perannya dalam mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan pengendalian internal mampu menekan praktik oportunistik manajemen, sehingga memperkuat kinerja keuangan.

**H4 : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan**